

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah sebuah permasalahan global yang berhubungan dengan permasalahan kesusahan, kepentingan serta tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Angka kemiskinan meningkat akibat adanya pandemi Covid-19. Namun, kelompok perempuan menjadi golongan terbesar penduduk yang miskin. Ditinjau dari aspek perekonomian, terjadi ketimpangan kesenjangan kemiskinan diantara wanita dan pria. Diberbagai wilayah pihak wanita seringkali mengalami kemiskinan yang lebih mendominasi pada seluruh golongan umur dibandingkan pria. Ketidaksetaraan mengalokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan bentuk kemiskinan yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan dalam bentuk program guna mendukung dan berpihak kepada wanita miskin.

Kemiskinan beserta pendapatan rendah merupakan masalah pokok yang dihadapi pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian lebih di Indonesia. Hal ini bukan dikarenakan masalah kemiskinan sudah lama dan tetap ada diantara kita saat ini, tetapi semakin meningkatnya gejala seiring dengan krisis multidimensional yang dialami oleh negara Indonesia.¹ Kemiskinan adalah isu gender, dimana berkaitan dengan peran pokok perempuan dalam manajemen kesejahteraan keluarganya. Krisis multidimensional pada bidang ekonomi, politik dan sosial, bencana alam, banjir dan lain-lain sedang dihadapi oleh Indonesia yang berdampak terhadap ketersediaan sumber makanan seperti harga beras dan bahan primer lain yang mengalami kenaikan, hal demikian membuat beban berat bagi perempuan. Oleh karena itu, masalah perempuan sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa kualitas keluarga

¹ Nasrin Nasrin, Ermawati Ermawati, and Uswatun Hasanah, "Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 42–62.

sangat dipengaruhi oleh kualitas perempuan sebagai ibu rumah tangga.

Rumah tangga perempuan miskin pada umumnya selalu berusaha keluar dari kesulitan ekonomi dan mengupayakan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui penggalan potensi yang dimiliki secara optimal. Dengan begitu, guna mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan wanita dalam rumah tangga miskin menjadi permasalahan yang sangat penting. Dibutuhkan proses pembangunan dengan semangat solidaritas diikuti hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan sehingga cita-cita bangsa dapat terwujud yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghadapi globalisasi. Salah satu upaya pengoptimalan pemberdayaan perempuan dan masyarakat miskin dilakukan dengan pendampingan perempuan melalui pendekatan ekonomi produktif.² Sejak 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sudah dibangun oleh pemerintah Indonesia.

PNPM Mandiri merupakan program nasional berbasis pemberdayaan berwujud rancangan kebijakan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan rencana penanggulangan kemiskinan. Salah satu programnya yakni PNPM Mandiri Perdesaan. Program ini telah dinyatakan berhasil dengan bukti tersedianya akses pinjaman dana bergulir berbasis kelompok bagi masyarakat miskin produktif terutama kaum perempuan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan dan penciptaan lapangan kerja. Menurut Bambang Hariyono, Camat Godong Kabupaten Grobogan, pada awalnya bantuan pemerintah untuk rakyat bernama PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) kemudian berkembang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Fungsinya adalah untuk mengatasi kemiskinan secepatnya dan memperluas kesempatan kerja di desa. Namun di era sekarang, Program PNPM sudah tidak ada lagi, adapun perguliran pembiayaan yang masih ada hingga sekarang beralih nama dengan sebutan “Dana Amanah

² Rosalia Indriyanti Saptatiningsih, Tri Siwi Nugrahani, and Sri Rejeki, “Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan,” *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* (2015): 512–524.

Pemberdayaan Masyarakat” atau disingkat dengan DAPM/BKAD.

DAPM berasal dari dana bergulir PNPB Mandiri yang dimiliki oleh masyarakat guna dikelola secara langsung oleh masyarakat dan berfungsi untuk mengatasi kemiskinan berbentuk pemberdayaan. Dimana BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) adalah lembaga yang mengayomi Badan Pengawas UPK (BP. UPK) dan Unit Pengelola Keuangan. BKAD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2008 tentang kerjasama desa yang mengamanahkan agar desa membentuk Badan Kerjasama Desa (BKD). Pihak desa dapat melakukan dua jenis kerjasama yaitu kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.³ Adapun tujuan dari program ini yakni kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan indikator pencapaian kinerja dan standar akuntabilitas kepada para pelakunya menggunakan partisipasi perempuan. Dalam pelaksanaannya, DAPM diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam proses pembangunan di tingkat lokal, salah satu programnya adalah SPP.⁴

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah suatu bentuk pinjaman modal yang beranggotakan perempuan sebagai sarana untuk pengembangan usaha.⁵ Kegiatan tersebut secara umum memiliki maksud mengembangkan kegiatan simpan pinjam perdesaan agar berpotensi dan memudahkan akses pendanaan bagi usaha mikro. Sehingga berkurangnya rumah tangga miskin dengan terpenuhinya kebutuhan pendanaan sosial dasar dan kekuatan kelembagaan perempuan. Fokus utama kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang tergabung dalam

³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

⁴ Bram Christanto, “Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan,” *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 4, no. 3 (2015): 118–134.

⁵ Dimas Aprilianto, *Desain Kesejahteraan Umat Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2022).

kelompok simpan pinjam perempuan yang memerlukan pendanaan untuk usaha ataupun kebutuhan sosial dasar.⁶

Seiring dengan kemajuan arus globalisasi, perempuan banyak terlibat dalam dunia usaha, perempuan telah terjun dalam dunia perdagangan dari dulu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, 64,5 persen dari total UMKM dikelola oleh kaum perempuan. Perkembangan UMKM di Indonesia peranan pentingnya dipegang oleh perempuan termasuk di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Pelaku usaha mikro perempuan di Kecamatan Godong mengalami permasalahan dalam hal teknis. Adapun hambataannya seperti kekurangan modal, sehingga Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui UPK harus mampu menjadi lembaga penyedia keuangan yang dapat diakses oleh kaum miskin dengan adanya pinjaman dana bergulir DAPM.⁷ Sasaran dari LKM yaitu orang miskin sama seperti pola *Grameen Bank* yang dicetuskan oleh Muhammad Yunus.

Menurut teori *Grameen Bank* yang diterapkan di Bangladesh, sasaran pemberian kredit diprioritaskan untuk kelompok perempuan, dengan karakteristik dasar adalah pembiayaan tanpa jaminan sama halnya dengan program DAPM. Faktor tambahan penghasilan berpengaruh untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga, termasuk kesejahteraan keluarganya menjadikan kelompok perempuan sebagai sasaran yang tepat. Peran perempuan yang mengarah ke pemberdayaan ditunjukkan dengan tingkat konsumsi yang tinggi sehingga dengan memperdayakan tersebut akan tercipta suatu usaha produktif baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁸

Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang diberikan oleh pemerintah secara khusus ditujukan untuk masyarakat miskin produktif yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha melalui kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dana

⁶ Siti Hasanah, "Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 71–88.

⁷ Eko Supriyanto et al., "Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Perempuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" 13, no. 1 (2019): 44–56.

⁸ E K A Kurnia Sari et al., "SKRIPSI Disusun Oleh: EKA KURNIA SARI 135020401111010" (2017).

bergulir adalah bentuk pemberian pinjaman jangka pendek dari pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM dan diwajibkan mengembalikan angsuran setiap bulan dengan lancar. Pengukuran keberhasilan program bantuan dana bergulir DAPM dari segi kelancaran mengembalikan pinjaman dengan cara mencicil setiap bulannya. Pinjaman bergulir ini diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja usaha yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan perempuan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Listia bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari program simpan pinjam khusus perempuan (SPP) dengan pemberian modal untuk kelompok perempuan.⁹ Hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Christanto menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ghulam menunjukkan bahwa variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM adalah variabel bantuan pemerintah, karena dengan bantuan pemerintah yang baik maka dapat memberikan semangat kerja bagi pengusaha UMKM sehingga dapat melaksanakan kinerja dengan baik.¹¹

Kinerja diidentifikasi oleh ukuran kemampuan perusahaan dalam mengelompokan peluang dan inovasi guna mencapai tujuan. Keberhasilan kinerja UMKM bergantung kepada kinerja yang dilakukan. Kinerja UMKM berkontribusi terhadap perekonomian tersebut. Bilamana kinerja UMKM mengalami peningkatan maka hal tersebut akan berpengaruh pada kesejahteraan perempuan pelaku UMKM. Penelitian terdahulu oleh Alansori memperlihatkan bahwa kinerja UMKM

⁹ Rizki Linda Listia et al., "PENGARUH PROGRAM SIMPAN PINJAM TERHADAP" (n.d.).

¹⁰ Christanto, "Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan."

¹¹ Muhamad Yusuf Ghulam, "Pengaruh Bantuan Pemerintah Dan Kemampuan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Kota Jayapura," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 2 (2021): 53–64.

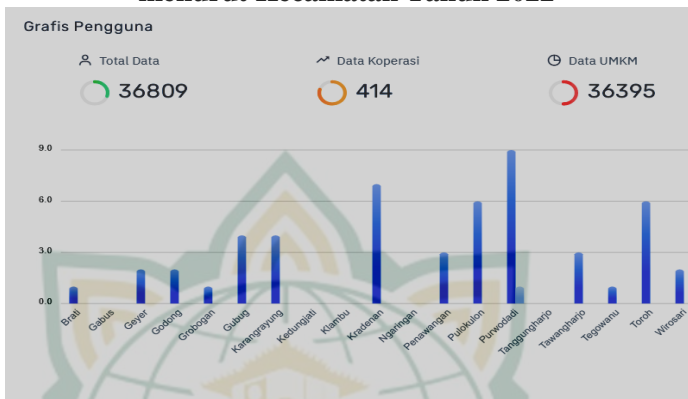
berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.¹² Hal ini menyatakan, jika kinerja UMKM meningkat maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Meningkatkan kinerja UMKM dapat dilakukan melalui peningkatan karakteristik dan kemampuan usaha.

Kemampuan usaha adalah kemampuan untuk mengelola sumber daya guna menghasilkan keunggulan kompetitif. Kemampuan usaha terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dari pengelola dalam mengatur berbagai aspek dalam menjalankan usahanya agar usaha tersebut berkembang. Kemampuan usaha diperlukan bagi pelaku usaha agar mampu bertahan dan berhasil, ketika usaha dikatakan berhasil tentunya pendapatan pelaku UMKM meningkat sehingga penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesejahteraan hidup adalah ketika kebutuhan dapat terpenuhi, dengan demikian maka kemampuan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wastuti, kemampuan usaha berpengaruh terhadap keberhasilan usaha UMKM, indikator didalamnya sangat menunjang keberlangsungan suatu usaha.¹³ Keberhasilan merupakan kesejahteraan pribadi dalam hal ini yaitu pelaku UMKM. Berikut adalah grafik jumlah UMKM di Kabupaten Grobogan menurut Kecamatan pada tahun 2022.

¹² Apip Alansori and Erna Listyaningsih, "The Impact of MSME Performance on MSME Welfare," *AdBispreneur* 7, no. 1 (2022): 39–53.

¹³ Aisyah Nur Wastuti, Wulan Sumekar, and Agus Subhan, "Pengaruh Motivasi Dan Kemampuan Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Pengolahan Pisang Di Kelurahan Rowosari , Semarang Effect of Business Motivation and Capability on Business Success of Banana Processing MSMEs in Rowosari , Tembalang , Semarang Setiap" 19, no. 2 (2021): 197–210.

Grafik 1
Data Banyaknya UMKM di Kabupaten Grobogan
menurut Kecamatan Tahun 2022



Sumber : sidataku.dinkopukmgrobogan.go.id

Berdasarkan data dari Dinkopukm, jumlah UMKM di Grobogan sampai sekarang mencapai 36.395 yang tersebar di 19 Kecamatan. Jumlah pelaku UMKM di Grobogan terus bertambah akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha yakni permodalan, pemasaran dan peningkatan daya saing. Masalah tersebut juga dialami oleh para pelaku UMKM di Kecamatan Godong. Berdasarkan grafik diatas, jumlah UMKM di Kecamatan Godong tergolong rendah, adapun kendala yang dihadapi dalam hal permodalan dan masalah dalam memasarkan produk masih manual yaitu *mouth to mouth*.

Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Godong, Kecamatan ini merupakan salah satu penerima program pemberdayaan masyarakat yaitu DAPM yang pelaksanaannya telah dimulai sejak lama dan masih berjalan sampai penelitian ini dilaksanakan. Kecamatan Godong merupakan salah satu lokasi yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Terbukti Kecamatan Godong merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang memiliki potensi yang baik dalam hal penyaluran dana desa tercepat, tepat sasaran dan tertib sesuai batas waktu sehingga mendapat penghargaan dari Bupati Grobogan sebagai daftar kecamatan dengan penyaluran dana desa terbaik tahun

2021.¹⁴ Akan tetapi timbul juga beberapa masalah dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana sebagian pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman modal tidak digunakan untuk modal usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendesak. Hal itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pemberian pinjaman dana bergulir DAPM bagi kesejahteraan perempuan pelaku UMKM dengan menambah beberapa variabel yaitu kinerja UMKM dan kemampuan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dari Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Kinerja UMKM dan Kemampuan Usaha Terhadap Kesejahteraan Perempuan Pelaku UMKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pinjaman dana bergulir dari DAPM terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong?
2. Apakah terdapat pengaruh kinerja UMKM terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong?
3. Apakah terdapat pengaruh kemampuan usaha terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pinjaman dana bergulir Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat terhadap

¹⁴ AdminGro6, “Bupati Berikan Penghargaan Camat Dan Kepala Desa Terbaik Penyaluran DD,” <https://www.grobogan.go.id>.

kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong

2. Mengetahui pengaruh kinerja UMKM terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong
3. Mengetahui pengaruh kemampuan usaha terhadap kesejahteraan perempuan pelaku UMKM di Kecamatan Godong

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari peneliti diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, membantu menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai manfaat pinjaman dana bergulir sebagai langkah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan diikuti karakteristik wirausaha serta modal agar usahanya dapat berkembang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan untuk pengembangan atau penyaluran modal program simpan pinjam khusus perempuan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam upaya kesejahteraan perempuan pelaku UMKM

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan memahami isi dan penyusunan skripsi yang telah disusun ini, peneliti membagi skripsi kedalam beberapa sub bagian sebagaimana berikut ini, yakni:

1. Bagian Pertama

Bagian ini meliputi cover, pengesahan, pernyataan akan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Menyajikan mengenai paparan latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika atas penyusunan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menyajikan penjelasan atas teori yang mendasari penelitian, konsep dan generalisasi hasil penelitian yang yang mampu dijadikan sebagai landasan teoritis guna dilaksanakannya penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menyajikan mengenai uraian akan metodologi penelitian, informasi mengenai cara pengumpulan data, pengolahan data hingga analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan-pembahasan yang dirincikan kedalam beberapa sub-bab sebagai bagian yang mampu mencerminkan temuan atas pemecahan permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I serta gambaran atas objek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menyajikan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk kemudian diuraikan dalam bagian kesimpulan serta dituliskan akan keterbatasan penelitian yang ditindaklanjuti dengan pemberian saran yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Menyajikan bagian-bagian yang menjadi akhir dari penyusunan skripsi ini berupa catatan akan referensi yang digunakan dalam penelitian, serta bukti dokumentasi yang mendukung dan memperkuat penelitian ini.